

BAB II

DINAMIKA POLITIK AFRIKA SELATAN

A. Afrika Selatan Masa Apartheid

1. Afrika Selatan Masa Apartheid

Pada masa Apartheid Republik Afrika Selatan atau Uni Afrika Selatan adalah sebuah Negara di Afrika bagian selatan. Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia, Botswana dan Zimbabwe di sebelah utara, Mozambik dan Swaziland di sebelah timur laut. Keseluruhan Negara Lesotho terletak dipedalaman Afrika Selatan. Afrika Selatan terletak di 29° 00' S, 24° 00' T. Luas kawasannya adalah 1.219.912 km termasuk pulau Robben dan kepulauan Princes Edwards (pulau Marion dan pulau Princes Edwards). Afrika Selatan bersebelahan dengan samudra Atlantik di pantai barat dan samudra Hindia dipantai timur. Afrika Selatan merupakan sebuah Negara yang kaya dengan bahan tambang bernilai seperti emas, platinum dan berlian.¹⁵

Bahan tambang tersebut antara lain emas, kromium, antimony, arang, biji besi, manganese, nikel, fosfat, biji timah, uranium, berlian, platinum, kuprum, vanadium, garam, gas asli. Penduduk di Afrika Selatan dibagi menjadi empat kumpulan utama yaitu: orang kulit hitam, orang kulit putih,

¹⁵ ¹⁵ *Afrika Selatan*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan), di akses tanggal 25 januari 2010, 17:40 WIB.

orang berwarna (orang dari asia atau berdarah campur) dan orang berbangsa India. Kaum terbesar di Afrika Selatan adalah kaum pribumi berkulit hitam yaitu 77% jumlah penduduk disini. Kaum kulit putih terdiri dari 11% penduduk di sini, yang berbangsa Belanda, Prancis, Inggris dan Jerman. Kebanyakan orang eropa di Negara ini adalah keturunan penjelajah-penjelajah awal koloni Cape.¹⁶

Selain itu, 9% dari penduduk Afrika Selatan terdiri dari bangsa berwarna atau *coloured*. Dan, 3% lagi terdiri dari bangsa India yang berasal dari pedagang-pedagang India. Bentuk pemerintahan Afrika Selatan adalah Republik.²⁴ Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan yaitu sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Beliau dipilih melalui siding Nasional (*National Assembly*) dan Majelis Provinsi-provinsi Nasional (*National council of Provinces*) bergabung. Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, wilayah dan pemerintahan local yang mempunyai badan legislative serta eksekutif dengan daerah kekuasaan mereka masing-masing.¹⁸

Anggota Parlemen Afrika Selatan terdiri dari tiga badan yakni, *House of Assembly* yang terdiri dari 178 anggota kelompok kulit putih, *house of*

¹⁶ *Penduduk Afrika Selatan*, http://id.wikipedia.org/wiki/demografi_Afrika_Selatan di akses tanggal 25 januari 2010, 17:40 WIB.

¹⁸ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 119

¹⁹ *Politik Pemerintahan Afrika Selatan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Afrika_Selatan, di akses tanggal 25 januari 2010, 17:40 WIB.

representative yang terdiri dari 85 anggota dari kelompok kulit berwarna, dan *house of Delegates* yang beranggotakan 45 orang Asia.. anggota parlemen dapat sewaktu-waktu dibubarkan oleh presiden sebelum masa baktinya berakhir. Orang kulit hitam tidak mempunyai wakil dalam parlemen, karena pemerintah kulit putih telah menentukan bagian-bagian wilayah yang menjadi "Tanah air" mereka. Orang kulit hitam dianggap sebagai bangsa sendiri.¹⁹

Bangsa Inggris datang ke Cape pada tahun 1795 dengan ikut membantu penduduk asli menghadapi konflik dengan VOC, sehingga akhirnya sebagian wilayah Cape dapat dikuasai oleh Inggris. Dengan bertambah besarnya kekuasaan Inggris di Tanjung Harapan serta semakin banyaknya orang Inggris dan Scotlandia bermigrasi ke Afrika Selatan pada tahun 1820-1830an, maka orang-orang Boer semakin terdesak.²⁸ Kemudian mereka berhasil membentuk dua Republik yaitu The Orange Free State dan The South African Republic di Transvaal pada tahun 1853.

Namun dengan ditemukannya pertambangan intan di Kimberley pada tahun 1860an yang diiringi dengan pembangunan jalan kereta api, maka konflik antara orang Boer dengan Inggris semakin meningkat dengan terjadinya perang Anglo-Boer I (1880-1881) dan Anglo-Boer II (1899-1902), yang dimengangkan oleh tentara Inggris. Selanjutnya orang Inggris dan Boer melakukan perundingan perdamaian di Pretoria. Perundingan ini menghasilkan "perjanjian vereegening" yang antara lain berisi:

- a. Republik Transvaal dan Orange Free State diberikan kepada British Empire
- b. Orang Boer menjadi warga Inggris dan pemukiman orang Boer akan segera direnovasi
- c. Pemerintahan sendiri akan segera dibentuk
- d. Bahasa Belanda dan Inggris diberikan disekolah-sekolah dan dipakai dalam pengadilan.

2. Konstitusi Uni Afrika Selatan

Pada masa perjalanan Apartheid, kemudian negara Afrika Selatan digabungkan dengan wilayah Cape oleh pemerintah Inggris secara bertahap dengan nama "Union of South" pada tanggal 31 mei 1910 dengan status dominion yang berada dibawah kerajaan Inggris. Dalam konstitusi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam diketiga wilayah hanya diberikan kepada warga kulit putih yang laki-laki saja, sedangkan warga kulit hitam tidak memiliki hak pilih dan dipilih dalam parlemen.¹⁷

Pada masa itu, pada criteria ekonomi Afrika Selatan di bidang pertanian dan dengan tidak membedakan warna kulit, berarti mereka yang memiliki hak milik atas tanah dan kepemilikan lainnya saja yang berhak memilih dan dipilih. Kedua partai Afrikaner yang terdapat pada kedua

¹⁷ Darsiti Soepratman, *Sejaran Afrika Zaman Imprealisme Modern*, Penerbit Vita, Yogyakarta, 1965, hal. 75.

Republik Boer sebelumnya bergabung bersama menjadi "*South African Party*" (SAP) yang dipimpin oleh Jendral Louis Botha dan Jendrah Jan Smuth. Dikalangan pemimpin Afrikaner yang tergabung dalam SAP juga terjadi perpecahan. Menghadapi kenyataan itu akhirnya SAP terpecah menjadi dua partai dengan dibentuknya "*National Party*" (NP) oleh BM Hergotz tahun 1912.

Walaupun demikian pemerintahan Botha tetap bersikukuh untuk mengeluarkan *Native Land Act* tahun 1913, yang isi pokoknya tidak dibenarkannya hak kepemilikan tanah kepada semua warga kulit hitam diluar tanah yang sudah dicadangkan secara khusus bagi penduduk asli. Dan nantiinya dikenal sebagai kawasan pemukiman penduduk asli yang disebut *homelands* dan *Bantustan*. Selain itu penduduk kulit hitam tidak dibenarkan untuk menyewa tanah yang telah menjadi milik warga kulit putih.

Peraturan inilah yang telah menjadi pilar utama politik Apartheid dalam menjalankan dominasi politik kulit putih yang telah dikukuhkan dalam konstitusi 1910. Dikeluarkan pula kebijakan *Native (Urban Areas) Act* pada tahun 1923, dimana warga kulit hitam tidak dibenarkan tinggal di perkotaan, kecuali untuk bekerja bagi kulit putih. Hal ini dimaksudkan untuk member kesempatan kepada warga kulit putih yang tinggal di pedesaan untuk melakukan urbanisasi sebagai buruh perkotaan, karena terjadi resesi ekonomi sesudah perang. Dalam pemilihan anggota parlemen tahun 1924, partai

nasional dibawah pimpinan Hertzog, memenangkan pemilu dan dia menjadi perdana menteri.

Pemerintah Hertzog mengeluarkan "*Civilized Labour Policy*", dimana tenaga kerja kulit hitam dalam berbagai jabatan harus diganti dengan tenaga kerja kulit putih.³³ Pada tahun 1948 pemerintah dikuasai Partai Nasional Kulit Putih yang melakukan segregasi resmi antara orang kulit putih dan orang kulit hitam atau yang lebih dikenal dengan istilah "Politik Apartheid".

3. Perkembangan Politik Apartheid Afrika Selatan

Dalam perkembangan Politik Apartheid, pada dasarnya Apartheid berasal dari bahasa Afrikaans. Menurut Dennis Worrell, Apartheid adalah campuran antara Calvinis dengan praktek-praktek kolonial yang pada pokoknya mengajarkan bahwa: "setiap ras mempunyai panggilan tertentu dan harus memberikan sumbangan budaya kepada dunia. Untuk maksud itu maka ras-ras itu harus dipisahkan satu sama lain dengan membatasi kontak antar ras, agar masing-masing dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadiannya."¹⁸

Sedangkan secara umum politik Apartheid adalah politik diskriminatif dan sangat rasialis yang dijalankan di Afrika Selatan. Apartheid menjadi politik resmi Afrika Selatan sejak tahun 1948 setelah partai nasional

¹⁸ Afrikaans adalah bahasa yang dikembangkan dari bahasa Belanda. Bahasa ini digunakan oleh orang keturunan Belanda (Boer) dan menjadi salah satu diantara 11 bahasa resmi Afrika Selatan.

memegang kekuasaan atas pemerintah.³⁷ Pemerintah pada masa itu dibawah kekuasaan Daniel Malan mengeluarkan *Group Areas Act* pada tahun 1950, sebagai pilar ketiga dari politik Apartheid yang sudah dibangun sebelumnya.

Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap golongan penduduk kulit hitam diharuskan menempati pemukiman diwilayah yang diperuntukkan secara khusus bagi setiap sukunya masing-masing. Dalam pelaksanaannya ternyata hanya 40% penduduk kulit hitam yang menaati UU tersebut, sementara 60% lainnya masih tetap berada diwilayah perkotaan serta wilayah pertanian dan wilayah pertambangan yang dikuasai oleh masyarakat kulit putih. UU diatas kemudian diikuti dengan berbagai UU Rasial lainnya seperti:

- a. Undang-undnag registrasi penduduk (1950) yang memecah penduduk berdasarkan ras yang diikuti dengan UU Tanda Pengenal (1953), yang mewajibkan semua warga Negara memakai Tanda Pengenal sesuai dengan rasnya masing-masing;
- b. Undang-Undang Larangan Kawin Campur antar ras dan Undang-Undang Ammoralias yang melarang hubungan sex antar ras (1949);
The Separate Amenities Act yang membedakan standar fasilitas umum antar ras;

- c. Undang-Undang Otorita bantu (1950), yang menghapus Dewan Perwakilan Penduduk Asli dan menggantikannya dengan system Hirarkis Kepala Suku yang diangkat oleh pemerintah;
- d. Undang-Undang pendidikan Bantu (1953), yang menempatkan pengawasan pendidikan kulit hitam berada di Departemen Urusan Penduduk Asli. Selain itu juga pemerintah mengambil alih sekolah-sekolah kulit hitam yang selama ini dikelola oleh Gereja dan Misionaris.

Keadaan Afrika Selatan, khususnya dibidang pendidikan pemerintah tidak hanya menerapkan sekolah yang terpisah, tapi juga pendidikan khusus bagi orang kulit hitam. Hal tersebut dapat dilihat dari system pendidikan yang ada di Afrika Selatan pada saat diterapkannya system Apartheid .

Undang-Undang Pendidikan Bantu yang dikeluarkan oleh pemerintah Apartheid pada tahun 1953 sangat jelas bertujuan untuk memisahkan system pendidikan kulit hitam bukan ditangani oleh Departemen Pendidikan, melainkan ditangani oleh Departemen Urusan Pribumi. Dengan UU Pendidikan Bantu itu jumlah guru kulit hitam berkurang banyak dari 8.817 ditahun 1954 menjadi 5.908 orang ditahun 1961. Akibat ratio guru-guru juga meningkat dari satu guru untuk 40 murid (1953) menjadi satu guru untuk 50 murid (1960). Dampaknya sangat terasa dalam hasil ujian akhir. Bila pada tahun 1953 ada 253

siswa kulit hitam yang bias masuk universitas, maka jumlah itu menurun menjadi 115 siswa saja pada tahun 1961.40.¹⁹

Melihat perkembangan politik diatas terbukti bahwa Afrika Selatan dalam keadaan negara yang sedang berkembang, baik dibidangkonomi, politik maupun budaya.

B. Kondisi Afrika Selatan Masa Apartheid

1. Afrika Selatan dipandang secara internasional

Secara internasional, bahwa Afrika Selatan di bawah rezim Apartheid membedakan antara empat Negara merdeka yaitu Tanjung, Natal, Transvaal, dan Orange Free State dengan empat Negara bebas lainnya yaitu Transkei, Bophuthatswana, Venda, dan Ciskei yang sering disebut dengan nagara TBVC. Otoritas local kulit putih bertanggung jawab untuk serangkaian fungsi-fungsi pemerintah lokal. Sedikit sekali otoritas kulit hitam yang berjalan secara ekonomis. Hal ini disebabkan kurangnya bisnis dan industry yang berarti, pendapatan perkapita masyarakat kulit hitam yang rendah, dan akses yang sangat terbatas terhadap sumber pendapatan seperti pajak bangunan dan jasa pendapatan.

¹⁹ Benjamin Paground, *Nelson Mandela*, PT. Gramediia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 38-40

Melihat kondisi Afrika Selatan yang membedakan warna kulit, terbukti bahwa Afrika Selatan mampu berdiri secara mandiri dengan membawa bangsa kulit hitam untuk hidup di benua Afrika.

2. Aktivitas Utama Ekonomi Afrika Selatan

Dalam aktivitas perekonomian Afrika Selatan berada pada posisi negara berkembang dengan pendapatan menengah. GDB Afrika Selatan merupakan 20% GDB seluruh Afrika, Afrika Selatan merupakan Negara paling maju ekonominya di benua Afrika.

Afrika Selatan baik pada dasarnya, kaya akan sumber daya, merupakan salah satu dari lima Negara hasil tambang terbesar di Dunia, katabukaan ekonominya tinggi. Industri tambang, manufaktur dan pertanian adalah tiga sector utama ekonomi Afrika Selatan. Secara garis besar perekonomian Afrika Selatan masa Apartheid adalah produk komulatif dari sedikitnya tiga tipe aktivitas utama antara lain:

a. Bidang Pertanian

Melihat bidang pertanian yang dengan jumlah hampir mencapai 60.000 keluarga pengusaha kulit putih dari jumlah total penduduk masyarakat kulit putih di Afrika Selatan, kelompok minoritas masyarakat kulit putih ini menguasai 86% dari total tanah di Afrika Selatan.

Sedangkan 16 juta penduduk masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan mendiami tanah seluas hanya 14% dari total tanah di Afrika Selatan. Tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat kulit putih ini adalah tanah-tanah pertanian yang subur, sedangkan tanah-tanah diperuntukkan secara khusus kepada kelompok masyarakat kulit hitam adalah tanah-tanah yang tidak subur dan kering tanpa pernah ada irigasi. Akibat system kepemilikan tanah yang bersifat rasial tersebut, sector pertanian di Afrika Selatan selama system Apartheid disomasi oleh intervensi pemerintah Apartheid dengan serangkaian hukum, ordinasi, statute, dan regulasi.²⁰

Kebijakan pertanian selama dasawarsa 1980-an ditentukan oleh dispense konstitusional tahun 1983 yang memberikan jalan bagi kelangsungan kebijakan sector pertanian dan industry pertanian dalam satu mata rantai yang tunggal. Kebijakan yang dimaksud dirumuskan dalam *White Paper on Agriculture Policy* tahun 1984 yang merupakan kebijakan pertanian komersial masyarakat kulit putih. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah pencapaian swasembada dalam bidang makanan, sandang, dan minuman setra persediaan bahan-bahan mentah untuk industry lokal pada tingkat harga yang memadai. Deregulasi dan

²⁰ Jenifer Piesse, Helmke Sartorius von bach, colin Thirtle dan Johan van Zyl, The Efficiency of Smallholder Agriculture in South Africa, *Journal of International Development*, Vol. 8/1, 1996, hal. 125.

liberalisasi sector pertanian mendorong upaya penghapusan atas pengawasan gerakan buruh di Afrika Selatan pada pertengahan dasawarsa 1980-an serta deregulasi pada sektor ekonomi mikro yang menyebabkan peningkatan aktivitas pada sektor informal.

Dari sektor pertanian, Afrika Selatan mampu mencukupi kebutuhan hidup bagi bangsanya serta dapat memperlancar proses pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

b. Bidang Pertambangan

dalam bidang pertambangan, Republik Afrika Selatan yang terletak dibagian selatan benua Afrika merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang. Kawasan Republik Afrika Selatan seluas 1.219.912 km² itu memiliki 37% cadangan aluminium silikat kimia, batubara dan sejumlah bahan tambang lainnya.

Republik Afrika Selatan juga terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber mineral, kualitas dan kuantitasnya bahkan melebihi sumber alam lainnya. Inilah yang menyebabkan Afrika Selatan memiliki lebih dari 40% cadangan untuk mineral, seperti Platina, Vanadium, Chrome, Mangan dan Uranium. Perkembangan ini mampu menarik investasi asing, immigrant, industry manufaktur, dan transportasi darat dari pelabuhan kedaerah pedalaman. Akan tetapi pemodalan dan pekerja ahli dan terampil dilingkungan industri

pertambangan dan industri lainnya dikuasai masyarakat kelompok kulit putih sedangkan masyarakat kulit hitam merupakan pekerja tidak terampil dan murah. Bahkan, ketersediaan tenaga kerja penduduk kulit hitam tetap terjamin dalam jumlah yang sangat besar dan murah. Akan tetapi, menurut laporan *World Competitiveness Report* 1993 yang disiapkan oleh *World Economic Forum* di Swiss, Afrika Selatan berada di peringkat ke-11 dari 15 negara industri baru. Afrika Selatan dibawah Mexico, Indonesia, dan Chili. Pertumbuhan GDP (Produk Domestik Bruto) turun dari 5,1% (1984) menjadi 2,1% (1992).²¹

Penyebab dari ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kandungan mineral yang dimiliki adalah kurangnya tenaga ahli yang terampil, terbatasnya pasar dalam negeri untuk produk yang dihasilkan serta letak yang jauh dari pasaran potensial.

Salah satu penyokong perekonomian selain bidang pertanian Afrika Selatan mampu menunjukkan perekonomian dalam dunia internasional yaitu dibidang Pertambangan yang menjadi salah satu hasil ekonomi sebagai kegiat perekonomian rakyat Afrika Selatan.

²¹ Deon T Brand, "Equity in South African: Political and Economic reform under the Government of National Unity", dalam Christine Fletcher, ed., *Equity and Development Across Nations: Political and Fiscal Realities* (New York: St. Martin's Press), 1996, hal. 76-77.

c. Bidang Manufaktur

Dalam sektor manufaktur, dijalankan oleh pihak swasta kulit putih dengan mempekerjakan semua warna kulit. Seperti halnya pada sektor pertambangan, pada sektor ini juga mempekerjakan semua pekerja dari berbagai semua warna kulit secara diskriminatif. Aktivitas sektor ini sebagian besar terpusat ditempat kawasan industry seperti Southern Trasvaal, Western cape, Durban, Pine Town, dan Porth Elizabeth. Di sektor ini Negara secara aktif ikut ambil bagian. Kini sector manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian dan menempati prosentase terbesar penerimaan Negara Afrika Selatan.

Nilai produksi manufaktur mencapai seperlima GDB. Industry tenaga listrik Afrika Selatan maju, dan mempunyai pusat pembangkit listrik dingin kering yang terbesar di dunia, jumlah pembangkit listriknya merupakan dua pertiga seluruh Afrika.

Dalam sektor ini menunjukkan Afrika Selatan mampu bekerjasama dengan orang kulit putih untuk bersama-sama membangun bidang ekonominya.

Untuk melihat keunggulan Afrika Selatan dalam bidang ekonomi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Table II
Sektor Ekonomi dan Produk-Produk Unggulan Afrika Selatan

Sektor	Produk-Produk Unggulan
Pertanian	Jagung, wool, gula, tembakau
Pertambangan	Emas, permata, batubara, biji besi, asbestos, vanadium, mangan
Manufaktur	Besi/baja, kendaraan bermotor, tekstil, dan produk tekstil, kayu dan produk kayu
Listrik	Listrik sumber batubara, air, dan nuklir
Transportasi/Komunikasi	Jalan raya, kereta api, pesawat terbang, dan telepon

Table 1 menggambarkan beberapa produk unggulan Afrika Selatan dalam perdagangan internasionalnya. Sektor pertambangan terutama produk emas dan permata merupakan primadona bagi potensi ekonomi Afrika Selatan selama bertahun-tahun. Akan tetapi, setelah tahun 1970-an sektor manufaktur memainkan peran yang sangat penting bagi perekonomian Afrika Selatan.²²

3. Peran Badan Investor untuk Perekonomian Afrika Selatan

Melihat peran badan investor dilihat dari sisi pemodal, ekonomi Afrika Selatan didukung oleh pemodal yang bersumber dari kelompok minoritas kulit putih. Potensi ekonomi Afrika Selatan adalah pada sektor manufaktur, pertambangan, dan pertanian/perkebunan yang bersifat

²² Raphael Kaplinsky, "Capital Intensity in South Afrika Manufacturing and Unemployment, 1972-1990", *World Development*, vol. 23/2, 1995, hal. 198 .

komersial. Kemampuan manufaktur dalam ekonomi sebagian besar disosialisasikan dengan tenaga kerja statis di sector informal.

Ketika sector padat modal mempertahankan tingkat investasi dan pertumbuhan yang tinggi, sector padat karya mengalami penurunan cadangan modal dan tingkat pertumbuhannya yang rendah.

Peran sektor permodalan sangat mendukung Bergeraknya ekonomi yang lebih maju untuk Afrika Selatan. Untuk melihat peran badan investor, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Table III
Peranan Hutang Luar Negeri Terhadap GDP (dalam %)

Tahun	PMA	Sumber lain	Total
1970	32,6	29,1	60,8
1975	27,4	33,1	61,5
1980	19,9	21,3	41,2
1981	19,7	24,5	44,2
1982	21,7	28,2	49,9
1983	21,3	29,7	51,0

Data table menunjukkan bahwa peran investor dalam kegiatan ekonomi Afrika Selatan lebih banyak diperoleh orang-orang kulit putih yang memperoleh pendapatan lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang menganut pembagian distribusi berdasarkan Apartheid . Penanaman investasi asing di Afrika Selatan didistribusikan pada beberapa bidang. Dalam bidang

ekonomi pendistribusian investasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Table IV
Distribusi hutang luar negeri berdasarkan sector ekonomi (dalam %)

Sector ekonomi	Penanaman modal asing	Sumber lain
Pertanian kehutanan dan perikanan	0,8	-
Pertambangan	8,1	18,1
Manufaktur	4,1	19,5
Litrik, gas, dan air	-	15,6
Konstruksi	0,7	0,1
Bisnis eceran, catering dan akomodasi	16,7	4,6
Transportasi dan komunikasi	1,0	7,8
Keuangan, asuransi, real estate, dan servis	30,8	23,1
Bisnis pelayanan masyarakat, social, dan perorangan	-	10,3
Lain-lain	0,6	0,8

4. Distribusi Ekonomi Masa Apartheid

Distribusi pada masa rezim Apartheid , kelompok masyarakat kulit putih yang merupakan kelompok minoritas, pada satu pihak memberikan kontribusi yang sangat dominan dalam struktur perekonomian Afrika Selatan.²³ Dibandingkan masyarakat kulit hitam yang merupakan kelompok mayoritas dilain pihak memberikan kontribusi yang sangat minimal.

Hal ini dapat terjadi karena sejumlah kebijakan ekonomi yang bersifat sangat diskriminatif. Pada satu sisi, kebijakan ekonomi yang bersifat

²³ Ibid. hlm. 44.

diskriminatif tersebut sangat menguntungkan kepentingan kelompok minoritas masyarakat kulit putih. Sebaliknya, pada sisi lain kepentingan kelompok mayoritas kulit hitam bahkan sama sekali diabaikan dan ditenggelamkan, dengan serangkaian pembatasan dan terhadap kebebasan mereka untuk beraktivitas baik dalam perpolitikan nasional dan local maupun perekonomian nasional. Otoritas kulit hitam bertanggung jawab untuk hal-hal yang sama dengan otoritas kulit putih, tetapi sedikit sekali otoritas local kulit hitam yang dapat berjalan secara ekonomis. Hal ini disebabkan tiga hal, pertama adalah kurang bisnis dan industry yang cukup berarti dalam wilayah otoritas masyarakat kulit hitam. Kedua adalah pendapatan perkapita masyarakat kulit hitam yang rendah walaupun secara keseluruhan pendapatan perkapita Afrika Selatan termasuk tinggi. Ketiga adalah akses yang sangat terbatas terhadap sumber-sumber pendapatan seperti pajak bangunan dan keuntungan jasa perdagangan. Pada tahun 1990, menurut perkapita Bank Dunia, pendapatan nasional Afrika Selatan, yang diukur berdasarkan pada tingkat harga antara tahun 1988-1990, mencapai 90.410 juta dolar Amerika Serikat atau ekuivalen dengan pendapatan perkapita sebesar 2.350 dolar Amerika Serikat.

Pada tahun 1990, aliran masuk modal asing mencapai negative 91 juta dolar Amerika Serikat tetapi kemudian naik secara positif sebesar 212 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1991. Dua tahun setelah itu, aliran masuk

modal asing ini mengalami penurunan drastic dengan nilai negative 42 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1992 dan negative 19 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1993. Pendapatan pemerintah provinsi-provinsi di Afrika Selatan pada tahun 1992-1993 sebesar 12,4% berasal dari pendapatannya sendiri dan 87,6% bersumber dari alokasi pemerintah pusat.²⁴

Pemerintah pusat membiayai lebih dari 85% pengeluaran pemerintah provinsi di Afrika Selatan. Dari sisi ini, ekonomii Afrika Selatan dibawah rezim Apartheid sangat sentralistik dan propinsi-propinsi secara ekonomi menjadi subordinasi dari pemerintah pusat. Akan tetapi, kelompok miskin di Afrika Selatan yang terutama merupakan kelompok mayoritas masyarakat kulit hitam juga sangat besar, disamping mereka juga sangat mendominasi sector-sektor informal yang bersifat tradisional. Politik Apartheid menyebabkan ketidakefisienan aktivitas ekonomi dan tatanan social ekonomi, kesejahteraan dan akses jasa public menjadi tidak seimbang. Sehingga sebagian besar masyarakat kulit hitam terperangkap dalam kemiskinan structural yang berkepanjangan.

5. Afrika Selatan Pasca Apartheid

Transformasi politik yang terjadi di Afrika Selatan melalui pemilu multi rasial dan bentuknya konstitusi baru sekaligus menandakan satu titik

²⁴ Peter Brixen dan Finn Tarp, South Afrika: Macroeconomic Perspectives for Medium Term *World Development*, vol. 24/6. 1996, hal. 989.

balik dari suatu system Apartheid yang sangat rasial kepada suatu system yang demokratis yang harus mampu mempertemukan seluruh ras di Afrika Selatan dalam kedudukan dan kesempatan yang sama dan derajat.

Selain itu juga sebagai momentum bagi kelompok mayoritas kulit hitam untuk memperoleh hak politik dan ekonominya. Menurut Dankwart Rustow menerbitkan sebuah tulisan tentang "transisi demokrasi", prasyarat bagi demokratisasi mencakup berbagai factor atau prasyarat yang tampak berhubungan dengan munculnya rezim demokrasi. Factor-faktor itu dikelompokkan menjadi empat yaitu factor ekonomi, factor social, factor eksternal dan factor kultural. Berdasarkan konstitusi baru, Afrika Selatan mulai membenahi masalah politik dan ekonominya untuk mengisi format politik dan ekonomi nasionalnya yang lebih baik dan demokratik serta menentukan dan memainkan peran internasionalnya baik dalam tatanan ekonomi internasional yang sedang bergerak kearah perdagangan bebas maupun dalam tatanan dunia Afrika pada umumnya dan kawasan bagian Selatan benua Afrika pada khususnya. Transformasi ekonomi mengandung dua arti. Pertama, adalah pemberdayaan kelompok mayoritas masyarakat kulit hitam dalam bidang ekonomi nasional, termasuk kelompok minoritas lainnya yaitu masyarakat kulit berwarna seperti India, Cina, dan Indonesia.

Sedangkan arti kedua adalah pemeliharaan momentum aktivitas ekonomi kelompok minoritas masyarakat kulit putih dalam perekonomian

dominasi ekonomi kelompok, membuat Afrika Selatan dalam perekonomian yang merata bagi rakyat kulit hitam di Afrika Selatan.²⁵

7. Kebijakan Dalam Negeri dalam Sistem Ekonomi

Salah satu kebijakan ekonomi pasca Apartheid adalah kebijakan pembangunan ekonomi. Pemerintah Persatuan Nasional pasca Apartheid memberikan prioritas pada kebijakan pembangunan dengan melancarkan satu kebijakan pembangunan yang dinamakan RDP. Program ini diarahkan pada pembangunan social ekonomi untuk memberdayakan komunitas kulit hitam dalam perekonomian nasional dan menjawab momentum kekuatan ekonomi komunitas kulit putih di Afrika Selatan.

Sehingga dapat mencapai tujuan RDP yaitu menciptakan ekonomi Afrika Selatan yang kuat, dinamis dan seimbang. RDP meliputi seluruh bidang untuk mendukung seluruh persatuan nasional dan reformasi ekonomi social yang berpegang pada enam prinsip ideal. *Pertama*, RDP harus merupakan suatu program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. *Kedua*, RDP menekankan pada proses yang berorientasi pada rakyat dan menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan.

Prinsip *ketiga* adalah RDP harus mampu menciptakan perdamaian dan keamanan bagi semua warga Afrika Selatan dari segala ancaman dan

²⁵ Dankward A Rustow, "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model", *Comparative Politics* 2, 1970, hal. 337.

intimidasi yang dilakukan oleh kelompok ras maupun kelompok etnik tertentu. *Keempat*, RDP mempertemukan pembangunan bangsa sebagai suatu bangsa yang modern. *Kelima*, RDP mempertemukan antara kebutuhan dasar dengan rekonstruksi dan pembangunan. Tujuan RDP adalah untuk menciptakan ekonomi Afrika Selatan yang kuat, dinamis dan seimbang untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Penghapusan kemiskinan
2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia
3. Penerapan persamaan kesempatan tanpa diskriminasi rasial, gender bagi promosi dan latihan
4. Penyeimbangan ekonomi dan masalah-masalah structural
5. Demokratisasi ekonomi
6. Pemyeimbangan ekonomi dan pembangunan dalam dan diantara wilayah]menciptakan kesempatan kerja yang produktif
7. Mengembangkan ekonomi kawasan yang sejahtera dan seimbang.61

Selama dua tahun pertama, 1994-1995, RDP memfokuskan pada tiga bidang kunci yaitu:

1. Penyediaan dana proyek pembangunan dan rekonstruksi
2. Pembiayaan dan aktivitas Proyek Utama Presiden

3. Formasi program investasi Infrastruktur dan kerangka kebijakan dalam bidang program kunci dari pembangunan perkotaan, pembangunan pedesaan dan pembangunan SDM.

Dalam kebijakan lainnya ditekankan pada kebijakan rasional regulasi. Berdasarkan kebijakan ini, Pemerintah Persatuan Nasional mengeluarkan enam Undang-Undang dan dua Peraturan pemerintah untuk mengimplementasikan *Land Reform*. Disamping itu, Pemerintah Persatuan Nasional menyelesaikan masalah hukum untuk membentuk institusi yudisial sebagai kunci bagi implementasi mekanisme tersebut. Dalam jangka pendek, RDP memang memberikan kepercayaan, tetapi hasil yang diharapkan masih kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat kulit hitam dan pelanjut potensi ekonomi masyarakat kulit putih.

Dalam jangka panjang, RDP belum juga member keyakinan bahwa program ini mengarah kepada transformasi social ekonomi masyarakat baru Afrika selatan. Akibat pemerintah persatuan nasional melancarkan suatu program baru yang dinamakan strategi pertumbuhan, lapangan kerja dan Redistribusi.

8. Kebijakan Ekonomi Makro Afrika Selatan

Dalam kebijakan ekonomi makro, Pemerintah Persatuan Nasional di bawah Presiden Nelson Mandela memperlihatkan suatu kebijakan disiplin

makro ekonomi yang ditujukan untuk memajukan kemampuan lingkungan ekonomi Afrika Selatan.

Dalam hal ini, pemerintah berusaha mengurangi tingkat pengeluaran konsumsinya dari tingkat yang mencapai 21% menjadi 17% dari GDP. Kenaikan pengeluaran modal dilakukan sedikit demi sedikit pada pertengahan dasawarsa 1990an. Dalam hutang luar negeri, Pemerintah Persatuan Nasional berketetapan bahwa hutang luar negeri itu tidak digunakan dalam skala besar bagi satu instrument pembiayaan deficit anggaran nasional. Yang terpenting perusahaan-perusahaan Afrika Selatan tidak mengambil banyak pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing.

Kesemuanya ini merupakan implementasi kebijakan pasar bebas yang mendukung pengendalian deficit anggaran dan privatisasi.⁶⁵ Pada tahun 1994, setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami disinvestasi aliran modal asing ke Afrika Selatan, investasi asing di Afrika Selatan kembali memberikan tanda-tanda untuk bangkit kembali dengan pencapaian positif terbesar 327 juta dolar AS. Pada tahun 1997, Afrika Selatan berhasil menarik investasi asing terbesar melalui privatisasi Perusahaan Telkom Afrika Selatan yang dibeli oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari SBC internasional dari AS dan Telkom Malaysia. Nilai investasi yang diperoleh dari privatisasi Perusahaan Telkom Afrika Selatan mencapai 1.21. juta Dolar AS.²⁶

²⁶ *South Africa Year Book*, 1996, Third Edition, hal. 192 .

9. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Afrika Selatan

a. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Prinsip dasar dalam mempertahankan perekonomian Afrika Selatan akan menekankan pada perdagangan luar negerinya dalam jangka panjang. Pada tahun 1998, perdagangan luar negeri Afrika Selatan diperkirakan akan meningkat karena beberapa hal, antara lain:

1. Investasi asing mulai masuk kembali ke Afrika Selatan karena perbaikan situasi social dan ekonomi
2. Program privatisasi perusahaan-perusahaan Negara akan dilanjutkan sehingga akan menarik investasi masuk kembali ke Afrika Selatan
3. RDP sebagai proyek pembangunan jangka pendek digantikan dengan program Redistribusi, Lapangan Kerja dan pertumbuhan yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Afrika Selatan.

Dalam menjalin kerja sama dibidang perekonomian dengan luar negeri, Negara yang tergabung dalam kelompok G-7 merupakan mitra dagang yang paling terkemuka bagi Afrika Selatan. AS, Jerman, Italia, dan Inggris merupakan empat Negara mitra dagang Afrika Selatan yang terkemuka dengan nilai melebihi 1000 juta Dolar Amerika Serikat.

Selain itu Negara-negara anggota Uni Eropa lainnya seperti Belgia, Luxemburg, Belanda dan Spanyol juga merupakan tujuan ekspor Afrika Selatan. Akan tetapi perkembangan ekonomi pasca Apartheid menimbulkan kekecewaan bagi Negara tetangga Afrika Selatan. Bagi Negara-negara sekawasan bagian Selatan Afrika, mereka melihat Afrika Selatan sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi regional di bagian selatan benua Afrika. Kekecewaan mereka disebabkan oleh kebijakan Protektif, sehingga Negara-negara tetangga Afrika Selatan sulit menjual produknya ke pasar Afrika Selatan.

Sedangkan produk Afrika Selatan membanjiri pasar internasional dan investasi asing banyak yang keluar dari Afrika Selatan. Hal ini menyebabkan kemunduran industry domestic Negara-negara tetangga Afrika Selatan. Akibatnya, GDP Afrika Selatan empat kali lebih besar dari GDP gabungan Negara-negara tetangganya yang tergabung dalam SADC.⁶⁸ Menurut Program Pembangunan PBB, Afrika Selatan adalah Negara terkaya ke-80 di dunia.

10. Program Amnesti Pajak Afrika Selatan

Strategi yang digunakan oleh Negara Afrika Selatan cukup baik dalam mensukseskan program *tax amnesty*, yaitu strategi "*pull and push*". *Pull*, dengan menarik atau memberikan insentif agar wajib pajak tertarik ikut serta dalam program ini. Misalnya dengan cara penghapusan denda atau bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tariff yang rendah. *Push*, dengan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya WP tidak mau

berpartisipasi. Misalnya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas *tax audit*, strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparansi hasil penyidikan serta sanksi pidana pajak sementara sebelum program amnesty diumumkan. Pada 1997 ada tambahan formulir bagi *foreign Passive Income* untuk dikenakan pajak bagi penduduk Afrika Selatan (misalnya: penghasilan atas bunga dan royalti), kemudian mengenai dampaknya diberlakukan bagi seluruh penduduk Afrika Selatan pada 1 January 2001. Tujuan utama amnesty pajak, yaitu :

1. Mewajibkan penduduk Afrika Selatan (misalnya: penghasilan atas bunga dan royalti), dan dampaknya kemudian diberlakukan bagi seluruh penduduk Afrika Selatan pada 1 January 2001.
 2. Member kewenangan bagi *South African Revenue Services (SARS)* dan *Exchange Control Departement of the South African Reserve Bank (SARB)* mengawasi Asset milik WN Afrika Selatan yang berada di LN
 3. Memfasilitasi pengembalian asset yang berada di LN
 4. Meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang datang.
11. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri antara Afrika Selatan dengan Negara-negara Berkembang

Pelaksanaan politik luar negeri Afrika Selatan tampaknya adalah sebagai refleksi dari munculnya dinamika baru kekuatan menengah di Negara sedang berkembang. Seperti apa yang dikutip Westhuizen pendapat Robert

Cox, bahwa politik luar negeri Afrika Selatan menggambarkan perdebatan politik luar negerinya dalam tiga hal yaitu dilemma perdagangan/hak asasi manusia, ketidak ikutsertaan masyarakat sipil dalam perumusan politik luar negeri dan orientasi probarat Afrika Selatan. Konstitusi Apartheid yang membedakan warna kulit telah diganti dengan konstitusi baru yang lebih demokratis.²⁷

Konstitusi baru ini telah menjamin kehidupan masyarakat yang multiras. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Alfred Nzo, telah menetapkan enam prinsip yang membimbing politik Luar Negeri terhadap situasi sekarang antara lain :

- a. Meningkatkan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Meningkatkan perbaikan demokrasi
- c. Peralihan dan Hukum Internasional dalam rangka hubungan antar bangsa
- d. Perdamaian Internasional dan menyetujui secara Internasional mekanisme resolusi konflik
- e. Kepentingan Afrika dalam urusan-urusan dunia
- f. Pembangunan ekonomi melalui kerjasama regional dan internasional dalam suatu dunia yang saling bergantung.⁷²

²⁷ Julian May, Thelde Stevens, annareth Stol, "*Monitoring The Impact of Land Reform on Quality of Life: A South Africa Case Study*", dalam Social Indicator Research, Netherland, Kluwer Academic Publisher, 2002, hal. 296.

Dalam Organisasi internasional yang dianggap penting adalah OAU, SADC, PBB dan GNB. Selain itu Afrika Selatan juga memiliki prioritas hubungan dengan beberapa Negara terutama Uni Eropa. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

1). Organization of African Unity (OAU)

Organisasi tersebut berdiri pada tahun 1963 dimaksudkan untuk dapat menciptakan perdamaian persatuan Negara-negara Afrika, konflik antar Negara ternyata merupakan tantangan paling besar di benua Afrika. Issue tentang identitas, pemerintah, alokasi sumber-sumber, kedaulatan Negara dan perjuangan kekuasaan kadang-kadang timbul sejalan dengan masalah pribadi, semua berkomplot tidak hanya mengakibatkan secara mengejutkan hilangnya kahidupan manusia, rudasaknya kekayaan dan merosotnya lingkungan.⁷³ Afrika Selatan secara resmi telah menjadi anggota OAU yang ke-53 pada tanggal 23 mei 1994. Dalam keterlibatan ini Afrika Selatan telah menyumbang sebesar R 1.334.603 kepada kepala Dana Perdamaian OAU yang dibiayai berdasarkan sukarela Negara-negara anggota. Politik luar negeri Afrika Selatan terhadap Negara-negara bagian selatan wilayahnya menunjukkan suatu komitmen kerjasama diplomasi yang dekat, ekonomi, keamanan dan integrasi, melindungi hak asasi manusia, peningkatan demokrasi dan

perencanaan solidaritas regional, perdamaian dan stabilitas yang demokratis. Tujuan SADC adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan regional, kerjasama dan integrasi ekonomi regional, maka hal itu sesuai dengan keinginan Afrika Selatan.²⁸

Posisi SADC adalah penting bagi Afrika Selatan dan sebaliknya Afrika Selatan juga mempunyai peranan penting dalam mensuplai air dan tenaga listrik bagi pembangunan sosio-ekonomi Negara-negara anggota SADC khususnya dan Negara-negara Afrika bagian selatan pada umumnya.⁷⁶ dalam ukuran regional, Afrika Selatan termasuk raksasa ekonomi.

Ekonomi Afrika Selatan tiga kali lebih besar dari ekonomi seluruh Negara-negara yang tergabung ke dalam SADC. Pada tahun 1993, Afrika Selatan menyumbang 27% PDB Afrika, 41% PDB kawasan Sub-Sahara, dan 64% Afrika Ekuatorial. Dari sisi militer, Afrika Selatan tetap merupakan suatu kekuatan militer yang signifikan.

2). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Melihat kerja sama antara PBB dengan Negara Afrika Selatan, sangat mendukung Negara Afrika Selatan untuk informasi kenegaraan serta dalam pembentukan perekonomian bagi Negara

²⁸ Ibid. hlm. 298.

tersebut. Negara Afrika Selatan juga telah resmi menjadi anggota PBB sejak tahun 1994, yang sebelumnya selama tiga decade Afrika Selatan telah terisolasi dan tidak masuk anggota PBB. Afrika Selatan telah masuk dalam Program Pembangunan PBB, yaitu UNICEF. Dalam rangka memperoleh bantuan internasional, Afrika Selatan telah menyetujui suatu perjanjian dengan ditandatanganinya Persetujuan Standar Bantuan Dasar (SBAA) dalam program pembangunan PBB (UNDP).²⁹

UNDP telah menyumbang tahap pertama sebesar US \$ 228.000 untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sebesar US \$ 220.000 untuk tahap kedua pembangunan pada umumnya. Bahkan UNDP telah membantu lagi sebesar US \$ 275.000 untuk peningkatan program latihan manajemen nasional. Bantuan lainnya adalah untuk mendukung program perumahan sebesar US \$ 50.000.

3). Gerakan Non-Blok (GNB)

Sebagai salah-satu Negara yang dapat bekerja sama secara internasional, Afrika Selatan juga telah menjadi anggota yang termuda dalam GNB yang secara resmi masuk pada bulan mei 1994. Sejak menjadi anggota Afrika Selatan telah aktif dalam berbagai

²⁹ *Business News*, 1 Juni 1996 .

kegiatan GNB termasuk dalam Konferensi Kepala Negara atau pemerintahan 1995. Wakil Presiden Thabo Mbeki yang menyerukan agar Negara-negara anggota GNB untuk membantu Negara miskin. Thabo Mbeki menyatakan bahwa perekonomian dunia harus dikelola dalam bentuk yang dapat menjamin pengalihan sumber dari Negara yang kaya kepada yang tidak.

Menurut Mbeki, pembangunan ekonomi Afrika Selatan harusnya tidak sekedar menjadi Negara berkembang atau pasar baru. Situasi yang sulit bagi kepemimpinan di bawah Afrika Selatan karena anggota GNB mengalami krisis ekonomi dan meningkatnya pertikaian di Afrika serta antar Negara tetangga seperti Pakistan dan India.

4). Hubungan Afrika Selatan dengan Uni Eropa

Afrika Selatan mengharapkan bahwa hubungan kedua belah pihak tidak hanya sekedar hubungan diplomatic yang terpenting adalah akses pasar Afrika Selatan dapat memasuki pasar Uni Eropa. Uni Eropa juga telah mempersiapkan suatu persetujuan bilateral yang memungkinkan bantuan pembangunan UE dapat diberikan kepada Afrika Selatan, dialog politik, perdagangan, kerjasama regional, masalah-masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, isu lingkungan hidup dan hubungan kebudayaan.

Afrika Selatan melihat bahwa hubungan dengan UE sangat menguntungkan dan menjadi prioritas penting. Karena UE merupakan mitra dagang terbesar, investasi dan mitra pembangunan Afrika Selatan.

12. Implikasi Kebijakan Terhadap Perekonomian Afrika Selatan

Berkaitan dengan kebijakan terhadap perekonomian yang diambil oleh pemerintah persatuan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat kulit hitam dan meningkatkan kesejahteraan seperti telah menunjukkan hasil yang baik. Sehingga sector perekonomian tidak hanya dikuasai oleh minoritas kulit putih, tetapi juga mayoritas kulit hitam ikut berperan dalam perekonomian Negara tersebut. RDP jelas akan mempengaruhi baik GDP maupun GNP Afrika Selatan. Hal tersebut dapat dilihat pada table 4.1 di bawah yang memperlihatkan perkembangan GDP Afrika Selatan sejak tahun 1992 hingga 1995 yang didasarkan pada tujuh sector ekonomi yang penting di Afrika Selatan.

Intik melihat imlikasu terhadap perekonomian di Afrika Selatan, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah uni:

Tabel V
Perkembangan GDP Afrika Selatan 1992-1995 (juta)

1992	1993		1994	1995
Pertanian	12.865	15.054	19.802	18.779
Pertambangan	26.502	30.505	33.172	33.305
Manufaktur	74.295	81.167	90.177	104.474
Konstruksi	10.308	11.249	12.281	13.606

Litrik, gas, air	12.764	13.969	15.506	17.797
Transportasi	25.232	26.780	29.030	32.691
Perdagangan	49.137	55.699	61.450	70.094
Lainnya	97.985	110.994	123.674	139.678
Total	309.085	345.949	385.092	430.424

Dalam redistribusi tanah diperkirakan dalam sepuluh tahun akan mencapai 1,5 juta keluarga yang terlibat dalam land reform. Di awal pemberlakuan land reform (1994-1999) target operasionalnya adalah mentransfer 30% dari 99 juta ha tanah pertanian atau sekitar 30 juta ha kepada warga kulit hitam. Setelah tiga tahun pemberlakuan land reform, sekitar 200,000 ha tanah telah dibagikan kepada 200.000 keluarga. Ini berarti telah memenuhi 0,6% dari target.³⁰ Dengan program ini masyarakat kulit hitam memperoleh landasan pijak tata ruang yang permanent bagi partisipasinya dalam perekonomian nasional. Berikut table perkembangan redistribusi tanah dalam land reform.³⁰

Melihat perkembangan serta kegiatan perekonomian Afrika Selatan yang dilakukan secara mandiri dalam suatu Negara maupun interaksi ekonomi secara internasional yang dilakukan dengan Negara-negara berkembang lainnya, membuktikan bahwa Afrika Selatan mengalami perubahan dari masa Apartheid ke masa modernisasi, sehingga pada saat

³⁰ Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga 2, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 2003, hal. 339.

sekarang ini Afrika Selatan mampu bersaing dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya dengan Negara-negara di dunia.